

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KABUPATEN CIANJUR

Zulfikar Nugraha Hidayat¹, Aji Mulyana², Mia Amalia³

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana

Email: zulfikar.n.h.07@gmail.com, ajimulyana@unsur.ac.id, miaamalia@unsur.ac.id

ABSTRACT

This research discusses the role of local government in addressing poverty in Cianjur Regency. Poverty is a global challenge faced by many countries, including Indonesia. The local government plays a central role in addressing poverty in Cianjur through the implementation of social assistance programs and policies that support local economic development. Poverty can also be interpreted as a condition in which individuals or groups do not have adequate access to the economic, social, and cultural resources needed to achieve a decent standard of living. By understanding and applying the principles of human rights, governments and institutions can design policies and programs to address poverty, improve social welfare, and ensure that the basic rights of every individual are respected and protected.

Keywords: *Economic, Government, Local, Poverty, unemployed*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Cianjur. Kemiskinan merupakan tantangan global yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menanggulangi kemiskinan di Cianjur dengan implementasi program bantuan sosial dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal. Kemiskinan juga dapat diinterpretasikan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok tidak mempunyai akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, pemerintah dan lembaga dapat merancang kebijakan dan program untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi.

Kata kunci: Daerah, Ekonomi, Kemiskinan, Pemerintah, Pengangguran

A. PENDAHULUAN

Secara umum kemiskinan juga merupakan tantangan global yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG), penurunan tingkat kemiskinan menjadi fokus utama. Fakta ini terkonfirmasi dengan menetapkan penurunan kemiskinan dan penanggulangan kelaparan sebagai prioritas pertama dan kedua, serta mengadopsi komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya. Masalah ini menjadi sorotan utama dalam berbagai upaya pembangunan, termasuk di tingkat nasional Indonesia.¹

Fenomena kemiskinan juga memang sangatlah kasat mata sebagai realitas berlapis-lapis yang terus menjerit-jerit (*crying poverty*). Kadar kemiskinan tidak lagi sekedar masalah kekurangan makanan, tetapi bagi warga masyarakat tertentu bahkan sudah mencapai tahap ekstrem sampai level kehabisan dan ketiadaan makanan.²

Dalam penanggulangan angka kemiskinan, peran pemerintah juga berperan sangat penting. Landasan penanggulangan kemiskinan diatur oleh berbagai Undang-undang, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pengenalan Undang-undang tertentu yang secara khusus menangani kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Pengenalan undang-undang dan kebijakan merupakan landasan hukum yang menentukan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Signifikan, peran pemerintah sebagai pemimpin dalam usaha mengatasi kemiskinan sangatlah penting. Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, merancang program, dan mengalokasikan sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui keterlibatan aktifnya, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk kerangka kerja yang mendukung penurunan kemiskinan. Pemahaman

¹ Mohammad Mulyadi, "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Dalam Masyarakat," *Jurnal Kajian* 21, no. 3 (2016): 221–36, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/776>.

² Mochamad Syawie, "Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial," *Sosio Informa* 16, no. 3 (2011): 213–19, <https://doi.org/10.33007/inf.v16i3.47>.

mengenai peran pemerintah sebagai agen utama dalam mengatasi kemiskinan memberikan konteks yang diperlukan untuk menyelidiki upaya penanggulangan kemiskinan secara holistik.

Persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, 2020 2,76 juta jiwa menjadi 27,55 juta jiwa, pada September 2021 sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen, Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen. Dengan mempertimbangkan periode September 2014. Jumlah penduduk miskin di Indonesia telah meningkat menjadi 27,73 juta orang pada bulan ketiga ini, menurut Kepala BPS Suryamin, yang mengatakan bahwa basis penduduk miskin di Indonesia sebesar 28,59 juta orang, atau 11,22% dari total penduduk Modal Sosial dan Kemiskinan, Ayu Diah Amalia 311 Indonesia. Angka tersebut meningkat dari realisasi jumlah penduduk miskin pada bulan Maret dan September tahun lalu, yang mencapai 860 ribu orang lebih dari 27,73 juta orang pada bulan September 2014. Ini adalah peningkatan dari 28,28 juta orang pada bulan Maret 2014, menjadi 310 ribu lebih banyak.³

Sampai akhir tahun ini, diperkirakan ada 1,5 juta orang lebih miskin di Indonesia, menurut LPEM FEUI, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Faktor penyebab lonjakan kemiskinan ini adalah perlambatan ekonomi global.

Banyak orang mengalami penderitaan akibat kelaparan dan kekurangan gizi, yang dapat mempercepat proses menuju kematian dini. Ini adalah suatu proses kematian yang berjalan perlahan namun kejam, di mana waktu dianggap sebagai *Zeit zum Tode*, atau perjalanan menuju kematian. Banyak individu yang tidak mampu mengatasi kondisi kemiskinan dan kelaparan ini. Tekanan hidup menyebabkan perasaan putus asa dan kehilangan rasa percaya diri. Ada banyak orang yang tidak mampu mengatasi rasa lapar dan kemiskinan mereka. Keterpurukan hidup tidak hanya membuat orang kehilangan harapan, tetapi juga membuat mereka merasa kalah dan tanpa daya. Dampaknya, beberapa orang terdorong untuk mengambil jalan pintas dengan bunuh diri sebagai cara untuk melarikan diri dari situasi sulit mereka. Bunuh diri dianggap sebagai bentuk pembebasan.

³ Ayu Diah Amalia, "Modal Sosial Dan Kemiskinan Social Capital and Poverty," *Sosio Informa, Puslitbang Kemensos RI* 1, no. 3 (2015): 1–14.

Saat ini, hampir setiap provinsi di Indonesia menghadapi masalah kemiskinan dan pengangguran yang sudah lama ada. Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dan pengangguran masih sangat tinggi di Indonesia. Sebenarnya, ada tren penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia sejak tahun 1998.

Namun, hingga semester kedua tahun 2016, angka tersebut masih berada di bawah dua digit, yaitu 10,7%. Tidak sama dengan tingkat kemiskinan tingkat pengangguran di Indonesia periode 1998 – 2016 sebenarnya tidak mengalami tren perubahan. Pada periode 1998 – 2005 tingkat pengangguran mengalami tren peningkatan. Akan tetapi, selepas periode tersebut sampai semester II 2016 mengalami tren penurunan. Pada semester II 2016, tingkat pengangguran di Indonesia sedikit dibawah tingkat pengangguran pada tahun.1998 (saat terjadi krisis ekonomi 1997/1998).⁴

Tujuan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa seolah hanya wacana saja. Semakin maraknya perencanaan dan kegiatan pembangunan belum mampu menanggulangi kemiskinan di Negeri Indonesia sehingga untuk mencari alternatif solusi kebijakan kedepan dalam upaya mempercepat mengentaskan kemiskinan diperlukan pemikiran dari berbagai lintas disiplin ilmu sosial.⁵

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang memusatkan perhatian pada analisis dan interpretasi bahan pustaka atau literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga untuk memahami dan menggali makna dari bahan-bahan yang diteliti. Metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif ini digunakan dalam penelitian yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep, pandangan, dan kerangka pemikiran yang ada dalam literatur ilmiah. Pendekatan ini memberikan keleluasaan untuk menggali makna-makna dan interpretasi yang kompleks dari bahan-bahan literatur.

⁴ Rasbin, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran,” *Jurnal DPR* 23, no. 2 (2018): 129–42, <http://www.jurnal.dpr.go.id>.

⁵ Hikmatul Maulidina, “Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi,” *Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi* 3, no. 2 (2019): 1–13.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Cianjur

Pemerintah daerah cianjur memiliki peran sentral dalam menanggulangi kemiskinan di Cianjur, sebuah kabupaten yang menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah ini. Salah satu upaya yang paling mencolok adalah implementasi berbagai program bantuan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Cianjur telah merancang kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal sebagai langkah utama untuk mengurangi kemiskinan. Ini termasuk investasi dalam sector pertanian, pengembangan industri kecil dan menengah, serta promosi pariwisata lokal. Dengan menggerakkan sektor – sektor ekonomi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat.⁶

Kemiskinan juga dapat diinterpretasikan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok tidak mempunyai akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak. Dari sudut pandang hukum, kemiskinan dapat terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemiskinan dikatakan dapat terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, karena kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dapat melanggar hak-hak yang diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, pemerintah dan lembaga dapat merancang kebijakan dan program untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi. Ini merupakan pendekatan holistik untuk memerangi kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan holistik juga untuk

⁶ Ilham Gemiharto and Evi Rosfiantika, “Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia: Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kota Bandung Provinsi Ja,” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* VII, no. 1 (2017): 103–16.

mengurangi kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melibatkan pemahaman bahwa kemiskinan bukanlah akibat dari satu faktor tunggal, melainkan hasil dari hubungan kompleks antara berbagai faktor yang saling terhubung. Pendekatan ini mencakup serangkaian langkah yang menyeluruh dan terintegrasi dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia.

Pemerintah Cianjur juga telah memperkuat kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga internasional untuk mendukung program-program anti-kemiskinan. Melalui kemitraan ini, dana dan sumber daya tambahan dapat dialokasikan untuk mendukung proyek – proyek pembangunan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memanfaatkan berbagai sumber daya ini, pemerintah berharap dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam menanggulangi kemiskinan di Cianjur. Meskipun telah ada sejumlah langkah positif, tantangan yang kompleks tetap ada. Pemerintah perlu terus mengidentifikasi dan menanggapi dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah di tingkat lokal. Koordinasi yang efektif antara berbagai tingkatan pemerintahan, lembaga swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dan mengatasi kemiskinan.⁷ Dalam konteks globalisasi, pemerintah Cianjur juga perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Pemberdayaan ekonomi melalui inovasi dan teknologi dapat menjadi salah satu kunci untuk memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Cianjur.

Selain itu, pemerintah juga berperan aktif dalam memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Cianjur. Program beasiswa dan bantuan pendidikan telah diperkenalkan untuk mendukung anak-anak dari keluarga miskin agar tetap bersekolah dan memiliki akses yang setaraterhadap pendidikan berkualitas. Dengan meningkatkan tingkat pendidikan di Cianjur, pemerintah berharap dapat membrikan bekal kepada generasi muda untuk dapat bersaing di pasar kerja dan mengurangi siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Pentingnya akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi fokus pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan.⁸ Dengan meningkatkan infrastruktur kesehatan dan

⁷ Ginanjar Rah Adi Fahmi, Sugeng Setyadi, and Umayatu Suiro, “Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten,” *Jurnal Ekonomi-Qu* 8, no. 2 (2018): 227–48, <https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450>.

⁸ Rah Adi Fahmi, Setyadi, and Suiro.

menyediakan akses yang lebih mudah terhadap layanan kesehatan dasar, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program vaksinasi, pencegahan penyakit menular, dan peningkatan aksesibilitas obat-obatan merupakan beberapa inisiatif yang telah diterapkan.

Pendekatan holistik tersebut bisa mencakup berbagai aspek kehidupan manusia didasarkan pada pemahaman bahwa kemiskinan tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi saja. Kemiskinan sering kali merupakan hasil dari interaksi antara faktor-faktor ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan banyak lagi. Oleh karena itu, untuk efektif memerangi kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan, perlu memperhatikan dan mengatasi seluruh spektrum kehidupan manusia.

Pemerintah juga memiliki peran kunci dalam memperhatikan dan mengatasi seluruh spektrum kehidupan manusia untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga memiliki peran sangat penting dalam memperhatikan dan mengatasi seluruh spektrum kehidupan manusia karena mereka lebih dekat dengan masyarakat setempat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh warganya.

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pemerintah Cianjur juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan inklusivitas. Kebijakan anti-diskriminasi dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan telah diperkenalkan untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan tersebar secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan di mana setiap warga dapat merasakan dampak positif dari upaya pembangunan, tanpa terkecuali. Peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Cianjur adalah sebuah perjalanan panjang yang melibatkan berbagai aspek kebijakan dan kolaborasi lintas sektor. Dengan fokus pada pembangunan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial, pemerintah berusaha untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan.⁹ Meskipun masih ada berbagai tantangan yang dihadapi, tekad dan komitmen pemerintah, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama internasional, membawa harapan untuk masa depan yang lebih baik di Cianjur, di

⁹ Shinta Yuniana Pertiwi, "Model Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan," *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 216, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3446>.

mana tingkat kemiskinan dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Pembaruan terus mewarnai peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Cianjur, dan kolaborasi lintas sektor menjadi semakin penting. Pemerintah terus berupaya meningkatkan infrastruktur di berbagai sektor, termasuk transportasi dan energi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Investasi dalam jaringan transportasi yang efisien tidak hanya mempermudah aksesibilitas ke pasar dan peluang pekerjaan, tetapi juga memungkinkan distribusi barang dan layanan secara merata di seluruh wilayah. Selaras dengan itu, pemerintah Cianjur terus memperkuat kerangka regulasi untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Mendorong inovasi dan kewirausahaan lokal menjadi fokus, dengan kebijakan insentif untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan.¹⁰

Program pemberdayaan perempuan juga menjadi bagian integral dari strategi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Dengan memberikan pelatihan keterampilan dan akses ke sumber daya, pemerintah berupaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pemberdayaan perempuan tidak hanya memiliki dampak positif pada tingkat rumah tangga tetapi juga mendorong transformasi sosial yang lebih luas. Upaya pencegahan kemiskinan juga melibatkan investasi dalam sektor kesehatan, terutama dalam program-program pencegahan penyakit dan peningkatan akses ke fasilitas kesehatan.¹¹ Pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan penyakit menular tetapi juga pada upaya preventif, termasuk program imunisasi dan kampanye kesehatan masyarakat. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap dapat mengurangi beban kesehatan masyarakat dan secara bertahap meningkatkan produktivitas.

Pemerintah dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tindakan-tindakan strategis, seperti melaksanakan program bantuan sosial, memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan, memperluas akses kesehatan,

¹⁰ Hanly Fendy Djohar Siwu, "Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2019, 1–11.

¹¹ Pertiwi, "Model Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan."

memberdayakan ekonomi lokal, menerapkan kebijakan kesejahteraan sosial, memperbaiki infrastruktur di pedesaan, melaksanakan program pemberdayaan perempuan, mengembangkan perumahan, merancang kebijakan penanggulangan pengangguran, dan menjalin kerjasama dengan sektor swasta dan LSM. Harapannya, penggabungan strategi-strategi ini dapat menciptakan suatu lingkungan yang mendukung penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.¹²

Pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tindakan strategis, seperti menyelenggarakan vaksinasi massal, menggelar kampanye edukasi kesehatan, melakukan pemeriksaan rutin, mengontrol penyakit menular, mendorong gaya hidup sehat, memperluas akses ke layanan kesehatan dasar, mengembangkan sumber daya manusia kesehatan, memastikan ketersediaan obat, menerapkan kebijakan kesejahteraan sosial, dan memanfaatkan teknologi kesehatan. Dengan menyatukan berbagai upaya ini, pemerintah diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh.¹³

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Cianjur

Kemiskinan di suatu daerah seperti Kabupaten Cianjur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Beberapa faktor yang umumnya dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan kebijakan. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Cianjur:

- a. Pendidikan rendah:** Orang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan yang membayar tinggi. Pendidikan yang buruk atau kurangnya akses ke pendidikan dapat menjadi kendala utama dalam mengatasi kemiskinan. Peluang pekerjaan yang terbatas sering dialami oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, sehingga mereka cenderung sulit mendapatkan akses ke pekerjaan yang memberikan bayaran tinggi. Pekerjaan yang

¹²Syafruddin Ritonga et al., “Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan Bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat,” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 1, no. 2 (2013): 112–26.

¹³ Siwu, “Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah.”

mengharuskan keahlian khusus atau pengetahuan lebih tinggi umumnya memberikan imbalan finansial yang lebih besar. Peluang pekerjaan yang terbatas sering dialami oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, sehingga mereka cenderung sulit mendapatkan akses ke pekerjaan yang memberikan bayaran tinggi. Pekerjaan yang mengharuskan keahlian khusus atau pengetahuan lebih tinggi umumnya memberikan imbalan finansial yang lebih besar. Peluang pekerjaan yang terbatas sering dialami oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, sehingga mereka cenderung sulit mendapatkan akses ke pekerjaan yang memberikan bayaran tinggi. Pekerjaan yang mengharuskan keahlian khusus atau pengetahuan lebih tinggi umumnya memberikan imbalan finansial yang lebih besar. Peluang pekerjaan yang terbatas sering dialami oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, sehingga mereka cenderung sulit mendapatkan akses ke pekerjaan yang memberikan bayaran tinggi. Pekerjaan yang mengharuskan keahlian khusus atau pengetahuan lebih tinggi umumnya memberikan imbalan finansial yang lebih besar. Hasil data penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan, usia anak, dan pendidikan kepala keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pendidikan anak. Pengeluaran pendidikan dan pendidikan kepala keluarga berpengaruh positif terhadap kualitas pendidikan anak, dengan pengeluaran pendidikan yang lebih tinggi dan pendidikan kepala keluarga yang lebih tinggi menunjukkan kualitas pendidikan anak yang lebih baik. Sebaliknya, variabel usia berpengaruh negatif, dengan usia yang lebih muda menunjukkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, terdapat komponen internal anak yang mempengaruhi kualitas pendidikannya, seperti motivasi belajar.¹⁴

- b. **Ketidaksetaraan gender:** Diskriminasi gender dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses ke sumber daya dan peluang, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kemiskinan, terutama bagi perempuan. Akses ke Pendidikan beberapa daerah masih mengalami ketidaksetaraan dalam mengakses pendidikan

¹⁴ Ferry Hadiyanto, "Analisis Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Anak Dari Tenaga Kerja Wanita: Studi Kasus Kabupaten Cianjur Dan Indramayu," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 17, no. 2 (2016): 97–102, <https://doi.org/10.18196/jesp.17.2.3782>.

antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan seringkali menghadapi kendala untuk masuk ke sekolah atau mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Pekerjaan dan upah terdapat perbedaan akses terhadap jenis pekerjaan tertentu antara laki-laki dan perempuan. Upah perempuan di berbagai sektor seringkali lebih rendah, bahkan ketika mereka melakukan pekerjaan yang setara dengan laki-laki. Partisipasi Politik Representasi perempuan dalam dunia politik cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki, termasuk dalam pengambilan keputusan politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Kesehatan dan Pelayanan Medis Beberapa perempuan menghadapi ketidaksetaraan dalam mengakses pelayanan kesehatan dan informasi medis, termasuk layanan kesehatan reproduksi. Ketidaksetaraan dalam tanggung jawab rumah tangga beban tanggung jawab dalam rumah tangga dan perawatan sering kali lebih besar pada perempuan, yang dapat membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi atau pendidikan. Ketidaksetaraan dalam hukum beberapa yurisdiksi masih memiliki hukum atau kebijakan yang mendukung ketidaksetaraan gender, baik dalam hal hak-hak perempuan maupun perlindungan terhadap kekerasan gender. Kekerasan gender: Tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia, merupakan bentuk ketidaksetaraan gender yang serius dan merugikan. Teknologi dan Akses Digital Kesenjangan akses digital antara laki-laki dan perempuan terjadi, di mana perempuan mungkin memiliki akses yang lebih terbatas terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Ketidaksetaraan dalam Hak Kepemilikan Tanah dan Harta. Di beberapa tempat, perempuan mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh hak kepemilikan tanah atau harta, yang dapat memengaruhi kemandirian ekonomi mereka. Perjuangan melawan ketidaksetaraan gender melibatkan usaha untuk mengatasi norma budaya dan struktural yang mendukung ketidaksetaraan serta mempromosikan kesetaraan hak dan peluang bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.¹⁵

¹⁵ Latif S. Shenouda and Albert M. Mattocks, "Diffusion of Drugs across the Isolated Mesentery," *Journal of Pharmaceutical Sciences* 56, no. 4 (1967): 464–69, <https://doi.org/10.1002/jps.2600560409>.

c. Kesehatan yang buruk: Orang-orang dengan kesehatan yang buruk mungkin menghadapi kendala dalam mencari atau mempertahankan pekerjaan, yang dapat menyebabkan kemiskinan. Biaya perawatan kesehatan yang tinggi juga dapat memberikan tekanan finansial yang signifikan. Karena itu, kesehatan dianggap sebagai modal dengan tingkat pengembalian yang positif, yang menguntungkan masyarakat maupun individu. Salah satu layanan publik yang disediakan pemerintah termasuk pelayanan kesehatan untuk anak-anak dan orang dewasa. Sebagai negara berkembang, sangat penting bagi pemerintah untuk merencanakan dengan cermat sistem kesehatan dan jaminan Kesehatan.¹⁶ Kesehatan yang buruk mencakup masalah fisik, mental, dan sosial. Penyakit menular seperti flu dan HIV/AIDS, penyakit kronis seperti diabetes dan kanker, gangguan mental seperti depresi, kekurangan gizi, kecanduan zat, lingkungan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, ketidaksetaraan akses ke layanan kesehatan, stres jangka panjang, dan ketidakstabilan sosial atau mental adalah beberapa contohnya. Faktor-faktor seperti pola makan sehat, gaya hidup aktif, manajemen stres, dan ketersediaan perawatan kesehatan yang memadai adalah bagian dari menjaga kesehatan yang baik. Menggunakan pendekatan holistik untuk memahami dan menangani masalah kesehatan dapat membantu mencegah atau mengatasi penyakit.

d. Kurangnya peluang pekerjaan: Kurangnya lapangan kerja atau peluang pekerjaan yang layak dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menyebabkan kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, struktural, atau politik. Faktor-faktor yang menyebabkan kekurangan peluang pekerjaan di Cianjur termasuk kurangnya diversifikasi industri, ketidakstabilan ekonomi lokal, tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang rendah, kurangnya infrastruktur, kurangnya dukungan pemerintah, persaingan global yang sulit, ketidaksetaraan gender, dan diskriminasi di pasar tenaga kerja. Untuk meningkatkan jumlah pekerjaan yang tersedia di Cianjur dan wilayah sekitarnya, diperlukan kolaborasi

¹⁶ Themby O.M. Palaneven, Een N. Walengwangko, and Jacline I. Sumual, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Ipm Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 4 (2018): 52–61.

antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Fokus kolaborasi ini harus pada peningkatan industri, pendidikan, infrastruktur, dan peluang bisnis. Saat ini, kita telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0, di mana rantai pasokan digital menjadi lebih mudah. Fenomena ini tidak dapat dihindari dan terjadi di seluruh dunia, dan Indonesia tidak terkecuali. Penggunaan internet yang meningkat pesat juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Bisnis yang beralih ke platform online mengalami peningkatan yang signifikan, baik secara online maupun offline. E-commerce, atau transaksi jual beli melalui internet, adalah salah satu bidang bisnis online yang sedang berkembang pesat. Terjadi kemajuan besar di bidang media informasi dan perdagangan.¹⁷

- e. **Kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi:** Orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah, modal, atau pelatihan keterampilan, mungkin sulit untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri. Penelitian ini memperlihatkan bahwa potensi kekuatan dalam keterkaitan modal sosial dan *bridging* memiliki dampak pada penurunan tingkat kemiskinan serta peluang bagi rumah tangga miskin untuk keluar dari kondisi garis kemiskinan. Dalam konteks faktor penentu status rumah tangga, baik miskin maupun tidak miskin, peran modal sosial *bridging* lebih mendominasi daripada peran modal *sosial bonding*. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa peran modal sosial *bridging* memiliki signifikansi yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, menandakan penurunan tingkat kemiskinan. Namun, temuan ini juga sejalan dengan kenyataan bahwa peran modal sosial *bonding* tidak memberikan dampak yang signifikan.¹⁸ Bukan hanya itu saja kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi di Cianjur dapat menjadi kendala serius dalam pengembangan ekonomi daerah. Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kurangnya akses ini meliputi keterbatasan akses terhadap modal

¹⁷ Sundari Cisilia, "Tantangan Bisnis Bagi Generasi Milenial," *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar*, no. Revolusi Industri 4.0 Merupakan Peluang Dan Tantangan Bisnis Bagi Generasi Milenial Di Indonesia (2019): 555–63, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/2111>.

¹⁸ Sofyan Yamin and Teguh Dartanto, "Pengentasan Orang Miskin Di Indonesia: Peran Modal Sosial Yang Terlupakan," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 17, no. 1 (2016): 88–102, <https://doi.org/10.21002/jepi.v17i1.07>.

finansial, infrastruktur yang terbatas, keterbatasan teknologi, dan kurangnya konektivitas dalam jaringan bisnis. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan usaha lokal, menciptakan peluang ekonomi yang lebih terbatas, dan membatasi potensi pengembangan sektor ekonomi di Cianjur. Upaya untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi kunci dalam merangsang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di daerah tersebut.

- f. Perubahan iklim dan bencana alam:** Bencana alam atau perubahan iklim dapat merusak mata pencaharian orang, merusak infrastruktur, dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang dapat meningkatkan tingkat kemiskinan. Sering kali terjadi di Cianjur, seperti banyak wilayah lain, mengalami dampak dari perubahan iklim dan risiko bencana alam. Faktor utama perubahan iklim dan bencana alam yang memengaruhi Cianjur mencakup peningkatan suhu global, ketidakaturan pola hujan, serta risiko banjir dan tanah longsor. Peningkatan suhu global berpotensi menyebabkan kerusakan pada ekosistem, sektor pertanian, dan kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Pola hujan yang tidak teratur atau intensitas hujan yang ekstrem dapat menyebabkan risiko banjir dan tanah longsor, terutama dengan pertimbangan rentan terhadap banjir karena topografi dan curah hujan yang tinggi. Perubahan iklim juga memberikan dampak negatif pada sektor pertanian dengan mengancam produktivitas tanaman akibat perubahan pola musim tanam dan panen. Pekerjaan di sektor pertanian atau yang rentan terhadap bencana dapat mengalami dampak serius, memengaruhi mata pencaharian masyarakat. Pemerintah dan masyarakat setempat di Cianjur secara aktif terlibat dalam upaya mitigasi dan adaptasi, termasuk melalui pembangunan infrastruktur tahan bencana, penerapan sistem peringatan dini, dan praktik pertanian berkelanjutan. Keterlibatan komunitas lokal dianggap sebagai elemen kunci dalam mengurangi dampak bencana dan memperkuat ketahanan lokal. Perlu ditekankan bahwa informasi ini dapat diperbarui dengan data terbaru, dan langkah-langkah pemerintah serta partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana alam di Cianjur. Bahkan di cianjur bukan hanya bencana alam banjir dan longsong saja namun belakangan ini sering terjadi gempa bumi bahkan

Salah satu peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 adalah gempa bumi dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 21 November 2022 pukul 13:21:10 WIB. Sampai November 2022, Indonesia telah mengalami 3.207 bencana alam, menurut Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 95% dari bencana hidrometeorologi terdiri dari banjir dan tanah longsor. Faktor utama penyebab adalah lokasi geografis Indonesia yang rawan bencana alam, terutama karena berada di *Ring of Fire on Pacific Rim*, atau Cincin Api Pasifik. Gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan tsunami sering terjadi di sini.¹⁹

- g. **Korupsi dan ketidakstabilan politik:** Korupsi dan ketidakstabilan politik dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi, menyebabkan ketidakpastian, dan pada akhirnya berdampak negatif pada kondisi ekonomi dan tingkat kemiskinan. Umumnya, korupsi dan ketidakstabilan politik memiliki dampak serius terhadap kemajuan suatu daerah. Tindakan korupsi dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian dan masyarakat, menghambat proses pembangunan, dan menciptakan ketidaksetaraan. Di sisi lain, ketidakstabilan politik dapat menghambat pengambilan keputusan, investasi, dan pembangunan jangka panjang. Agar dapat memahami kondisi spesifik di Cianjur terkait korupsi dan ketidakstabilan politik, dibutuhkan data yang terperinci dan terkini. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya Bupati Kabupaten Cianjur terbukti menggunakan Dana Alokasi Khusus Pendidikan untuk pembiayaan salah satu partai politik. Dalam hal ini Irvan Rivano Muchtar (Bupati Kabupaten Cianjur) dalam penegakan hukumnya melanggar Pasal 12 huruf F atau Pasal 12 huruf E atau Pasal 12 huruf B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pengganti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 1 Milyar. Faktor penghambat dari kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Cianjur yaitu tersangka lebih dari satu orang, banyaknya keterangan saksi didalam persidangan dengan

¹⁹ Fitria Budi Utami, Faisal Kemal, and Wahyu Fajar Nugraha, "Storytelling Method for Children'S Trauma Recovery Post Cianjur Earthquake Disaster," *Jabb* 3, no. 2 (2023): 403–9.

jumlah saksi 51 orang, pemeriksaan tersangka bukan hanya 1 kali, adanya faktor eksternal uang tersebut di korupsi oleh Bupati Kabupaten Cianjur diperuntukkan salah satu partai politik (NASDEM).²⁰

- h. Pengangguran atau upah rendah:** Orang yang mengalami pengangguran atau mendapatkan upah rendah mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, perumahan, dan pendidikan. Informasi tentang tingkat pengangguran dan upah rendah di suatu daerah seperti Cianjur dapat berubah seiring waktu. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, sektor ekonomi dominan, dan kebijakan ketenagakerjaan dapat mempengaruhi kondisi ini. Untuk mendapatkan gambaran yang akurat dan terkini, direkomendasikan untuk merujuk pada sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, instansi pemerintah setempat, atau lembaga riset ekonomi yang menyediakan data terperinci mengenai ketenagakerjaan di Cianjur, termasuk tingkat pengangguran dan upah rata-rata. Selain itu, informasi dari pemberitaan lokal, laporan riset, dan studi-studi ekonomi juga dapat memberikan wawasan tambahan mengenai kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut. Perlu diingat bahwa data terbaru diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan akurat tentang situasi ekonomi dan ketenagakerjaan di Cianjur. Jumlah pengangguran di Kabupaten Cianjur sangat rendah—hanya 67.000 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)—atau 0,1% dari 64 juta UMKM di Indonesia (BPS, 2018). Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Kabupaten Cianjur mencapai 95.100 orang, atau 10,10% dari total angkatan kerja. Sebaliknya, diharapkan para pelaku UMKM ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran.²¹
- i. Perubahan teknologi:** Perubahan dalam teknologi dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan tradisional dan memerlukan keterampilan baru, yang dapat menjadi tantangan bagi orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap pelatihan atau pendidikan yang diperlukan. Di Cianjur, seperti halnya di banyak wilayah

²⁰ Hakim Ikhlhas Mauriza, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus (Dak) Pendidikan Yang Dilakukan Oleh Bupati Kabupaten Cianjur” 5, no. 20 (2019): 623–28.

²¹ Dandi Bahtiar and Gita Rianti, “Analisis Faktor-Faktor Pelatihan Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Cianjur,” *Ilmu Manajemen Retail (JIMAT)* 2, no. 1 (2021): 1–6.

lainnya, perubahan dalam teknologi dapat berdampak pada hilangnya pekerjaan tradisional. Fenomena ini memerlukan perolehan keterampilan baru, yang dapat menjadi suatu tantangan khususnya bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap pelatihan atau pendidikan yang dibutuhkan. Masyarakat di Cianjur dan daerah sekitarnya mungkin menghadapi kesulitan dalam mengatasi transformasi pekerjaan yang dipicu oleh perubahan teknologi, dan hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan agar dapat menghadapi tuntutan pekerjaan masa depan. Maka dari itu teknologi juga sangat penting sebagai salah satu alat dalam pelaksanaan pembangunan, ternyata menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan mengubah orientasi teknologi dari fokus semata pada keuntungan ekonomi menjadi lebih memperhatikan kelestarian fungsi dan kapasitas lingkungan. Oleh karena itu, dikembangkan teknologi produksi bersih yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pada seluruh siklus hidup suatu produk teknologi, mulai dari pemilihan bahan baku produksi hingga pembuangan limbah.²²

- j. **Ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar:** Ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik dapat memperburuk kondisi hidup dan meningkatkan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar di Cianjur merujuk pada ketidakmerataan dalam kemampuan masyarakat untuk mendapatkan layanan-layanan esensial. Layanan-layanan tersebut mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Ketidakmerataan ini dapat timbul dari berbagai faktor, seperti lokasi geografis, tingkat ekonomi, atau faktor-faktor sosial. Dalam konteks Cianjur, ketidaksetaraan akses bisa tercermin dalam perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, tingkat pendidikan, atau tingkat ekonomi masyarakat. Upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan ini mungkin melibatkan peningkatan infrastruktur, perbaikan akses terhadap layanan pendidikan

²² T A Adibtoro, "Prospek Dan Permasalahan Dalam Transfer Teknologi Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 2011, 121–28, <http://103.224.137.161/index.php/JTL/article/view/245>.

dan kesehatan, serta implementasi kebijakan yang mendukung inklusivitas dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Cianjur. Hingga kini, wilayah Cianjur selalu mengalami keterbelakangan, khususnya dalam sektor pendidikan, terutama terkait akses layanan dan penyebaran program pembelajaran inovatif. Kendala ini muncul karena jarak yang cukup jauh dari Cianjur, sehingga menghambat perkembangan layanan pembelajaran *mobile learning*. Di sisi lain, beberapa daerah di Cianjur, seperti Desa Nagrak, menghadapi tuntutan untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas layanan pembelajaran di sekolah-sekolah nya. Jika dianalisis dari perspektif inovasi dalam pembelajaran, terlihat bahwa salah satu indikator masyarakat yang inovatif adalah upaya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang sedang berkembang dalam Masyarakat.²³

k. Ketahanan Terhadap Bencana

Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana yang suatu ketika dapat terjadi merupakan sebuah faktor yang penting. Tingkat kesiapsiagaan Masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan Masyarakat dalam mengatasi berbagai konflik dan permasalahan kemiskinan yang terjadi pasca bencana. Contohnya seperti bencana alam yang terjadi pada tahun 2022 kemarin, gempa sebesar 5,6 SR telah meluluhlantakkan bangunan infrastruktur dan rumah Masyarakat sehingga kemiskinan di Cianjur meningkat pesat karena gempa yang terjadi menyebabkan berbagai kerugian. Selain Masyarakat, pemerintah juga berperan dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi pasca bencana agar dapat meminimalisir kemiskinan dan dampak yang terjadi setelah bencana alam yang terjadi.

3. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Cianjur

Upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Cianjur, seperti di banyak daerah lainnya, melibatkan berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Ada beberapa program kerja pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan di kabupaten cianjur.

²³ Pariz Maulana Septiana and Librianti Kurnia Yuki, "Mobile Learning Untuk Pedesaan Dan Pemanfaatannya Bagi Masyarakat," *Jurnal Mahasiswa Pendidikan Informatika* 3, no. 1 (2021): 75–82.

a) **Program Bantuan Sosial:** yang umumnya diperkenalkan oleh pemerintah daerah, dirancang untuk memberikan dukungan kepada keluarga miskin. Dalam kerangka ini, bentuk bantuan dapat mencakup pemberian tunai, distribusi paket sembako, atau penyediaan subsidi untuk keperluan kesehatan. Program Bantuan Sosial di Kabupaten Cianjur merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin dengan maksud meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini mencakup berbagai bentuk dukungan, termasuk pemberian tunai, distribusi paket sembako, dan subsidi kesehatan. Sasaran utama dari program ini adalah mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut, memastikan keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan layanan kesehatan, serta memberikan perlindungan ekonomi kepada mereka yang berada dalam situasi rentan. Pemerintah cianjur mengadakan program bantuan Sosial di Kabupaten Cianjur diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan pokok dan memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang memerlukan. Pemerintah dengan sungguh-sungguh mengembangkan strategi kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, yang ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan bagi orang miskin dan rentan melalui kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif. Komitmen ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Tujuan dari perlindungan sosial komprehensif adalah agar penduduk Indonesia dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang layak dan mampu mengatasi secara finansial segala risiko sosial ekonomi yang dihadapi. Implementasi perlindungan sosial komprehensif dilakukan melalui integrasi program-program penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan terpadu²⁴.

b) **Pendidikan dan Pelatihan:** Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Cianjur dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, sehingga memberikan mereka peluang lebih baik di pasar

²⁴ Dini Fajar Yanti and Isbandi Rukminto Adi, "Analisis Process Terhadap Strategi Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Cianjur Dalam Kerangka Result-Based Management," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 9, no. 2 (2021): 146–63, <https://doi.org/10.15408/empati.v9i2.18133>.

kerja.mengikuti Partisipasi P4S Tani Mandiri juga dapat meningkatkan pemahaman pembibitan tanaman pada peserta pelatihan tergambar dari nilai awal sebesar 1183 menjadi 1482 setelah pelatihan. Demikian pula, peran P4S Tani Mandiri tampak dalam peningkatan keterampilan pembibitan tanaman, yang dapat dilihat dari peningkatan skor peserta pelatihan dari 1322 menjadi 1657 setelah mengikuti pelatihan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa P4S Tani Mandiri memiliki andil signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan.²⁵

- c) **Pengembangan insfrastruktur:** Pengembangan infrastruktur di Cianjur memiliki tujuan untuk meningkatkan sarana publik dan prasarana guna mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Proses ini mencakup perbaikan sistem transportasi, program penyediaan air bersih, pembangunan bandara, peningkatan infrastruktur energi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan area pusat perbelanjaan dan perumahan. Sasaran akhirnya adalah menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan proyek ini, koordinasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas setempat sangat diperlukan. Kebijakan pariwisata di Cianjur Selatan masih belum mencapai tingkat optimal. Strategi dan arah kebijakan, bersama dengan komitmen pemerintah, tampaknya kurang kuat dalam mewujudkan kebijakan yang telah diinisiasi, terutama dalam mengundang partisipasi masyarakat dan investor swasta. Lebih lanjut, daya saing pariwisata di Kabupaten Cianjur menunjukkan tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain, yang menjadi tantangan signifikan bagi Cianjur Selatan. Untuk mengatasi hal ini, perbaikan dan peningkatan faktor-faktor pendukung pariwisata seperti jumlah hotel, kualitas jalan, tingkat hunian hotel, dan tingkat pendidikan tenaga kerja di sektor pariwisata menjadi krusial dan memiliki dampak

²⁵ Asep Saepul Alam, Ahmad Nur Rizal, and Moh Dian Tresnawan, "Peran Pusat Pelatihan Pertanian Dan Pedesaan Swadaya (P4s) Dalam Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Peserta Pelatihan (Studi Kasus Di P4s Tani Mandiri Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat)," *AGRITA (AGri)* 3, no. 2 (2021): 71, <https://doi.org/10.35194/agri.v3i2.1924>.

yang nyata terhadap industri pariwisata.²⁶ Maka dari itu pemerintah harus melengkapi kebutuhan pariwisata seperti hotel, kualitas jalan, tingkat hunian hotel, dan tingkat Pendidikan tenaga kerja. Setelah semua terpenuhi pariwisata di Cianjur Selatan akan naik karena di daerah Cianjur Selatan banyak sekali tempat pariwisata seperti karang potong dan banyak sekali wisata yang lainnya.

- d) **Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil:** Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Cianjur bertujuan untuk memberdayakan sektor ekonomi skala kecil agar dapat lebih berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal. Langkah-langkah pendukung melibatkan pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan pengusaha UMK. Upaya juga dilakukan untuk membantu UMK mengakses pasar melalui pemasaran online, meningkatkan infrastruktur, mendorong kemitraan dengan sektor swasta, dan mempromosikan kerja sama antar UMK. Fokus pada peningkatan literasi keuangan dan fasilitasi perizinan bertujuan memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan mempermudah proses administratif UMK. Harapannya, pengembangan UMK di Cianjur tidak hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencapai hal ini, kerjasama aktif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendukung ekonomi lokal menjadi kunci. Dengan untuk mengembangkan pemasaran, membuka potensi penjualan kepada konsumen baru, dan mempermudah proses perizinan usaha adalah faktor pendorong diferensiasi produk dan keahlian produksi. Faktor-faktor ini berasal dari internal mitra atau usaha. Sebaliknya, faktor penghambat mencapai tujuan melibatkan rendahnya motivasi dan kepercayaan diri mitra, kurangnya pengetahuan dalam menggunakan aplikasi, kurangnya fleksibilitas produksi, dan kurangnya evaluasi usaha. Semua faktor penghambat berasal dari internal mitra atau usaha. Oleh karena itu, untuk mencapai

²⁶ Yaya Mulyana, Abu Huraerah, and Rudi Martiawan, "Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Cianjur Selatan Di Kabupaten Cianjur Jawa Barat," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no. 1 (2019): 490–511.

target yang telah ditetapkan dalam *The House Model*, mitra perlu memiliki motivasi untuk mengembangkan kegiatan usahanya.²⁷

e) Perluasan Layanan Kesehatan: Perluasan layanan kesehatan di Kabupaten Cianjur mencakup pembangunan dan perluasan fasilitas kesehatan, peningkatan tenaga kesehatan, pengembangan program kesehatan masyarakat, pemanfaatan teknologi kesehatan, penguatan sistem rujukan, pelatihan dan pendidikan kesehatan masyarakat, serta penyediaan obat dan peralatan medis. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah menjadi kunci dalam mendukung upaya pemerintah. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program dan layanan, serta menentukan perbaikan yang berkelanjutan. Tujuan utama perluasan layanan kesehatan adalah meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada aksesibilitas, mutu, dan keberlanjutan pelayanan.²⁸

f) Pengembangan Program Penanggulangan Pengangguran: Pengembangan program penanggulangan pengangguran di Cianjur melibatkan sejumlah strategi untuk meningkatkan peluang pekerjaan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Ini mencakup pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, kemitraan dengan industri, promosi kewirausahaan, program magang dan penempatan pekerjaan, diversifikasi ekonomi, pendidikan dan pelatihan berbasis industri, inovasi teknologi, kolaborasi dengan pihak swasta, serta monitoring dan evaluasi untuk menyesuaikan strategi dan mencapai tujuan. Kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan holistik. Bukan hanya itu saja pemerintah juga menyediakan solusi untuk mengatasi pengangguran melalui pelatihan kerja didasarkan pada uraian sebelumnya. Pemerintah berinisiatif menyediakan fasilitas untuk memberikan pelatihan dan meningkatkan keterampilan, khususnya bagi

²⁷ Vincent Vincent et al., "Peningkatan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Kluster Makanan Kering Di Kabupaten Cianjur," *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 11–22, <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i1.3722>.

²⁸ Mira Miranti Puspitasari and Purnawan Junadi, "Analisis Implementasi Integrasi Layanan PPIA HIV Ke Layanan Antenatal Di Kota Depok 2017," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI* 7, no. 2 (2018): 79–87.

mereka yang belum memiliki keterampilan atau bahkan bagi lulusan sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan. Tujuannya adalah agar mereka tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki masing-masing individu.²⁹

g) Kolaborasi Pihak Swasta dan LSM

Kerjasama antara pihak swasta dan LSM dalam menanggulangi kemiskinan merupakan sebuah yang harus diperhatikan secara mendalam agar kemiskinan yang terjadi dapat diatasi dengan baik. Namun, partisipasi masyarakat pun perlu karena faktor internal yang berada dalam diri sendiri mendorong agar memberantas angka kemiskinan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Cianjur memiliki peran sentral dalam menanggulangi kemiskinan. Pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan dan program yang direncanakan dengan baik. Selain itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Cianjur antara lain pendidikan rendah, ketidaksetaraan gender, kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi, korupsi, ketidakstabilan politik, perubahan teknologi, dan ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar. Maka dari itu, pemerintah dapat menerapkan berbagai macam program diantaranya program bantuan sosial, kebijakan pendukung dalam pengembangan ekonomi lokal, serta menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga internasional yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ataupun program yang telah direncanakan dengan baik.

Dengan demikian, pemerintah daerah harus berkonsentrasi pada memperkuat sektor ekonomi lokal, membantu usaha kecil dan menengah, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan juga harus menjadi prioritas agar individu yang memiliki kompetensi yang cukup memiliki akses yang lebih besar ke pekerjaan yang lebih baik. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan

²⁹ M. Abd. Jalil, "Solusi Mengatasi Pengangguran Di Indonesia," *Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah* 18, no. 1 (2017): 30–45.

peningkatan akses terhadap layanan kesehatan adalah masalah penting lainnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Selain itu, meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Melalui pelaksanaan berbagai inisiatif strategis ini, pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan melibatkan program bantuan sosial, pendidikan, pelatihan, pengembangan infrastruktur, kebijakan pariwisata, pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta perluasan layanan kesehatan. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibtoro, T A. “Prospek Dan Permasalahan Dalam Transfer Teknologi Lingkungan Di Indonesia.” *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 2011, 121–28. <http://103.224.137.161/index.php/JTL/article/view/245>.
- Alam, Asep Saepul, Ahmad Nur Rizal, and Moh Dian Tresnawan. “Peran Pusat Pelatihan Pertanian Dan Pedesaan Swadaya (P4s) Dalam Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Peserta Pelatihan (Studi Kasus Di P4s Tani Mandiri Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat).” *AGRITA (AGri)* 3, no. 2 (2021): 71. <https://doi.org/10.35194/agri.v3i2.1924>.
- Amalia, Ayu Diah. “Modal Sosial Dan Kemiskinan Social Capital and Poverty.” *Sosio Informa, Puslitbang Kemensos RI* 1, no. 3 (2015): 1–14.
- Bahtiar, Dandi, and Gita Rianti. “Analisis Faktor-Faktor Pelatihan Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Cianjur.” *Ilmu Manajemen Retail (JIMAT)* 2, no. 1 (2021): 1–6.
- Budi Utami, Fitria, Faisal Kemal, and Wahyu Fajar Nugraha. “Storytelling Method for Children’S Trauma Recovery Post Cianjur Earthquake Disaster.” *Jabb* 3, no. 2 (2023): 403–9.
- Gemiharto, Ilham, and Evi Rosfiantika. “Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia: Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kota Bandung Provinsi Ja.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* VII, no. 1 (2017): 103–16.
- Hadiyanto, Ferry. “Analisis Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Anak Dari Tenaga Kerja Wanita: Studi Kasus Kabupaten Cianjur Dan Indramayu.” *Jurnal Ekonomi & Studi*

- Pembangunan* 17, no. 2 (2016): 97–102. <https://doi.org/10.18196/jesp.17.2.3782>.
- Hakim Ikhlas Mauriza. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus (Dak) Pendidikan Yang Dilakukan Oleh Bupati Kabupaten Cianjur” 5, no. 20 (2019): 623–28.
- Jalil, M. Abd. “Solusi Mengatasi Pengangguran Di Indonesia.” *Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah* 18, no. 1 (2017): 30–45.
- Maulana Septiana, Pariz, and Librianti Kurnia Yuki. “Mobile Learning Untuk Pedesaan Dan Pemanfaatannya Bagi Masyarakat.” *Jurnal Mahasiswa Pendidikan Informatika* 3, no. 1 (2021): 75–82.
- Maulidina, Hikmatul. “Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi.” *Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi* 3, no. 2 (2019): 1–13.
- Mulyadi, Mohammad. “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Dalam Masyarakat.” *Jurnal Kajian* 21, no. 3 (2016): 221–36. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/776>.
- Mulyana, Yaya, Abu Huraerah, and Rudi Martiawan. “Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Cianjur Selatan Di Kabupaten Cianjur Jawa Barat.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no. 1 (2019): 490–511.
- Palaneven, Themby O.M., Een N. Walengwangko, and Jacline I. Sumual. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Ipm Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 4 (2018): 52–61.
- Pertiwi, Shinta Yuniana. “Model Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan.” *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 216. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3446>.
- Puspitasari, Mira Miranti, and Purnawan Junadi. “Analisis Implementasi Integrasi Layanan PPIA HIV Ke Layanan Antenatal Di Kota Depok 2017.” *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI* 7, no. 2 (2018): 79–87.
- Rah Adi Fahmi, Ginanjar, Sugeng Setyadi, and Umayatu Suiro. “Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten.” *Jurnal Ekonomi-Qu* 8, no. 2 (2018): 227–48. <https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450>.

- Rasbin. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran." *Jurnal DPR* 23, no. 2 (2018): 129–42. <http://www.jurnal.dpr.go.id>.
- Ritonga, Syafruddin, Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu, and Ilmu Politik. "Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan Bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 1, no. 2 (2013): 112–26.
- Shenouda, Latif S., and Albert M. Mattocks. "Diffusion of Drugs across the Isolated Mesentery." *Journal of Pharmaceutical Sciences* 56, no. 4 (1967): 464–69. <https://doi.org/10.1002/jps.2600560409>.
- Siwu, Hanly Fendy Djohar. "Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2019, 1–11.
- Sundari Cisilia. "Tantangan Bisnis Bagi Generasi Milenial." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar*, no. Revolusi Industri 4.0 Merupakan Peluang Dan Tantangan Bisnis Bagi Generasi Milenial Di Indonesia (2019): 555–63. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/2111>.
- Syawie, Mochamad. "Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial." *Sosio Informa* 16, no. 3 (2011): 213–19. <https://doi.org/10.33007/inf.v16i3.47>.
- Vincent, Vincent, Chelsey Meisyana, Kathleen Wira Riady, Natasha Abigeyl, Ghian Grimaldi Hamid, Vincent Vincent, Elisa Margaretha, Andrew Johannes Joan, and Dwining Putri Elfriede. "Peningkatan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Kluster Makanan Kering Di Kabupaten Cianjur." *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 11–22. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i1.3722>.
- Yamin, Sofyan, and Teguh Dartanto. "Pengentasan Orang Miskin Di Indonesia: Peran Modal Sosial Yang Terlupakan." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 17, no. 1 (2016): 88–102. <https://doi.org/10.21002/jepi.v17i1.07>.
- Yanti, Dini Fajar, and Isbandi Rukminto Adi. "Analisis Process Terhadap Strategi Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Cianjur Dalam Kerangka Result-Based Management." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 9, no. 2 (2021): 146–63. <https://doi.org/10.15408/empati.v9i2.18133>.

